



## TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM (*PUBLIC ORDER*):

### SEBUAH PENDEKATAN BIBLIOMETRIK

**Annisa Rahmadanita**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*Corresponding author:* [anis@ipdn.ac.id](mailto:anis@ipdn.ac.id)

Received: 31-08-2023, Accepted: 13-09-2023; Published Online: 13-09-2023

### ABSTRAK

Ketertiban umum merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan teratur. Namun perkembangan mengenai ketertiban umum belum diketahui secara rinci. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tren penelitian di bidang ketertiban umum. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan batasan Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris. Analisis *co-word* pada analisis bibliometrik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data. Analisis data juga menggunakan aplikasi VOSviewer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa publikasi ilmiah dengan subjek "*public order*" pada pangkalan data Scopus sebanyak 2524 dokumen. Pada rentang tahun 1991-2023 dan dibatasi publikasi dengan Bahasa Inggris, tipe dokumen artikel, kata kunci *public order*, *source type journal*, dan *subject area social sciences*, terdapat sebanyak 103 dokumen. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2015 hingga 2017. Tren paling tinggi dalam jumlah publikasi tercatat terjadi pada tahun 2022, dengan total 14 dokumen yang diterbitkan. Terdapat 2856 kata kunci, 25 di antaranya saling berhubungan dan dikelompokkan dalam 4 kluster. Kesimpulannya bahwa terdapat 25 kata kunci yang menjadi tren berdasarkan nilai occurrence minimal 10 diantaranya adalah *policing*, *police*, *freedom*, *right*, *event*, *paper*, *case*, *principle*, *violence*, *disorder*, *public space*, *use*, *role*, *international law*, *person*, *trend*, *concept question*, *threat*, *Russian federation*, *citizen*, *constitution*, *individual*, *human right*. Kata kunci tersebut menjadi tren disebabkan beberapa faktor yaitu adanya konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan. Topik-topik penelitian terkait dengan konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan, direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan kajian mendalam dan berkelanjutan terkait topik-topik yang menjadi tren tersebut. Adapun topik "*russian federation*", "*citizen*," "*constitution*," "*individual*," dan "*human right*" memiliki potensi untuk dieksplorasi dalam penelitian mendatang.

**Kata Kunci:** Analisis Kata Kunci, Bibliometrik, Ketertiban Umum, Scopus.



### **ABSTRACT**

*Public order is a condition in which people walk in a safe, peaceful, and orderly atmosphere. But developments regarding public order are not yet known in detail. This study aims to determine the trend of research in the field of public order. The research method used is quantitative paradigm with bibliometric approach. Researchers used purposive sampling technique with the limitation of the language used is English. Co-word analysis on bibliometric analysis used by researchers in analyzing data. Data analysis also uses the VOSviewer application. The findings showed that scientific publications with the subject of "public order" in the Scopus database as many as 2524 documents. In the range of 1991-2023 and limited to publications in English, article document type, public order keywords, source type journal, and subject area social sciences, there are 103 documents. It can be seen that the number of publications has increased significantly in the period from 2015 to 2017. The highest trend in the number of publications was recorded in 2022, with a total of 14 documents published. There are 2856 keywords, 25 of which are interconnected and grouped in 4 clusters. The conclusion that there are 25 keywords that become a trend based on the value of occur at least 10 of them are policing, police, freedom, right, event, paper, case, principle, violence, disorder, public space, use, role, international law, person, trend, concept question, threat, Russian federation, citizen, constitution, individual, human rights. The keyword became a trend due to several factors, namely the social and political context, legal and judicial cases, technological and information Developments and Human Rights and freedoms. Research topics related to social and political contexts, legal and judicial cases, technological and information developments as well as human rights and freedoms, are recommended for further research. It is necessary to carry out in-depth and continuous studies related to the topics that are trending. The topics "russian federation," "citizen," "constitution," "individual," and "human rights" have the potential to be explored in future research.*

**Keywords:** *Keyword Analysis, Bibliometrics, Public order, Scopus.*

## PENDAHULUAN

Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum, dan etika saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama sangatlah penting. Upaya menjaga ketertiban umum merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana pendapat (Sandra et al., 2019) bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerapan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dengan melakukan sosialisasi. Pemeliharaan ketertiban umum juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat (Mantiri & Siwi, 2020). Di samping sosialisasi terkait dengan peraturan daerah, adanya pembinaan, penertiban di lapangan dan penyuluhan juga dapat menjadi upaya dalam penyelenggaraan ketertiban umum (Lasahido, 2021). Menghayati betapa pentingnya ketertiban umum di dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah awal dalam menjelajahi isu ini secara lebih mendalam. Dari kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas hingga menjaga lingkungan bersih, konsep ketertiban

umum memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan bersama. Dalam pandangan yang lebih luas, pemeliharaan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan stabilitas.

Tiap negara memiliki pandangan tentang ketertiban umum yang walaupun beragam dalam regulasi serta implementasinya. Prinsip dasar mengenai ketertiban umum ini memiliki peran yang signifikan sebagai upaya darurat ketika sebuah negara menghadapi situasi sulit yang memerlukan penerapan hukum dari luar negeri (Wahyuni, 2014). Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan prinsip fundamental di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun, pendekatan dan konteks pelaksanaannya dapat bervariasi berdasarkan perbedaan budaya, hukum, dan sistem pemerintahan. Di berbagai negara, kepolisian berperan sentral dalam menjaga ketertiban umum dengan memastikan hukum dan peraturan diikuti serta menangani situasi-situasi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Sementara itu di Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran krusial dalam memelihara ketertiban umum di Indonesia. Dengan tugas dan

wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum sangat penting.

Umumnya, ketertiban umum di Indonesia sejalan dengan ketenteraman umum. Ketenteraman merupakan suasana batin seseorang yang tenang dan tidak ketakutan serta tidak was-was, sementara ketertiban umum merupakan “kondisi dinamis yang menggambarkan adanya keteraturan dan kepatuhan kepada hukum, norma dan kesepakatan umum” (Eviany & Sutiyo, 2023).

Indonesia mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Sementara itu, pada referensi internasional disebutkan bahwa ketertiban umum internasional meliputi prinsip-prinsip dasar keadilan atau moralitas yang diinginkan negara; aturan yang dirancang untuk melayani politik, sosial, atau ekonomi yang mendasar kepentingan negara, yang dikenal sebagai *lois de polis* atau 'aturan ketertiban umum'; kewajiban suatu negara untuk memenuhi kewajibannya kepada negara lain atau organisasi internasional (Iryna et al., 2022) bahwa Ketertiban umum sebagai kepentingan yang dapat dilindungi merupakan kriteria penting untuk

menentukan ruang lingkup kejahatan terhadap ketertiban umum yang konsisten dan rasional, serta kategori khas ketertiban umum dapat diidentifikasi secara sosial dan normatif. Bahkan di India, sebagaimana pendapat dari (Narrain, 2018) bahwa dengan munculnya internet dan meningkatnya peredaran ujaran kebencian, dan materi yang dikaitkan dengan gangguan ketertiban umum, telah terjadi pergeseran wacana hukum seputar ujaran kebencian. Hal tersebut telah memunculkan berbagai mekanisme kelembagaan seperti laboratorium pemantauan yang sekarang menjadi bagian dari praktik kepolisian. Selain itu, organisasi masyarakat sipil sekarang bekerja sama dengan polisi untuk membantu memicu mekanisme untuk menghapus konten dari platform internet.

Dalam konteks analisis bibliometrik, studi tentang ketertiban umum memiliki relevansi yang signifikan karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang mempengaruhi keamanan, tata tertib, serta interaksi antarindividu. Ketertiban umum telah menjadi perhatian yang krusial bagi pemerintah, otoritas, penegak hukum, dan peneliti dalam upaya memahami bagaimana norma-norma sosial dan hukum berperan dalam menjaga keamanan serta melindungi hak dan

kebebasan masyarakat. Penelitian dalam domain ini dapat merangkum perkembangan konsep ketertiban umum, termasuk perubahan definisi dan prioritas yang muncul seiring pergeseran sosial, politik, dan teknologi. Dengan munculnya teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, perubahan dalam pola perilaku masyarakat, serta gejala sosial dan politik yang berkembang, penting untuk mengkaji tren dan dinamika yang mempengaruhi ketertiban umum. Analisis bibliometrik mampu mengungkap tren penelitian, fokus kajian, konsep-konsep kunci, dan interaksi antar-topik yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Penelitian terdahulu yang mengkaji ketertiban umum cukup banyak dilakukan. Sebagaimana pendapat Effendy (2020) yang menyatakan salah satu penyebab dari maraknya permasalahan keamanan dan ketertiban umum adalah meningkatnya angka kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan lainnya yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah (Damara, 2020). Masalah keterbatasan sumber daya manusia dan tidak meratanya pembagian jumlah anggota patroli yang dikerahkan pada level kelurahan/kecamatan juga masih menjadi kendala bagi

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Sakti & Pribadi, 2018). Keberadaan pedagang kaki lima dinilai dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan kota sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan yang tegas (Zuhraeni et al., 2022). Kebijakan yang tegas perlu beriringan dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik diantara para stakeholder dan pihak yang terkait (Rahmadanita, 2019).

Pada level kecamatan, Camat memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum (Nayoan & Kaawoan, 2018). Di sisi lain, Suhendi (2019) menyebutkan bahwa untuk menegakkan peraturan di daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk bekerjasama dengan kepolisian. Tidak sebatas itu saja, bahkan Fitri (2019) mengungkapkan bahwa pemerintah seyogyanya dapat memberikan perhatian bagi generasi muda dengan menyediakan kesempatan dan ruang publik turut serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Nurrahman (2020) menegaskan adanya aspek pengawasan ketat yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu upayanya adalah

dengan membentuk layanan pengaduan/laporan 24 jam yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut (Muchsin et al., 2020).

Merujuk pada uraian di atas, penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang saat ini penulis lakukan, belum pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan tersebut terlihat pada pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan bibliometrik. Sementara, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dalam mengkaji ketertiban umum. Oleh sebab itu penulis menilai bahwa ketertiban umum merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan teratur. Namun perkembangan mengenai ketertiban umum belum diketahui secara rinci. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tren penelitian di bidang ketertiban umum.

## METODE

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Bibliometrik merupakan metode kuantitatif yang berfokus pada analisis data bibliografi yang terdapat dalam jurnal atau artikel (Asmawanti S & Soya, 2023). Dalam konteks penelitian ini, metode bibliometrik diterapkan dalam bentuk analisis *co-word* (kata kunci)

dengan memanfaatkan aplikasi VOSviewer untuk memproses dan memvisualisasikan data, guna membangun peta perkembangan topik penelitian. Konsep tentang ilmu pengetahuan yang tercakup dalam sebuah dokumen dapat terlihat melalui penggunaan kata-kata (*co-word*) yang digunakan. Analisis *co-word* berdasarkan pada analisis kemunculan bersama kata-kata atau kata kunci dari dua atau lebih dokumen yang digunakan untuk mengindeks dokumen (Diodato dalam Tupan et al., 2018). Tujuan dari analisis *co-word* adalah untuk memahami isi, pola, dan kecenderungan (*trend*) dari sekumpulan dokumen dengan mengukur kekuatan istilah (*term*) yang digunakan (De Looze & Lemarie, 1997).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan VOSviewer, yang dapat menghasilkan klasterisasi dan menunjukkan keterkaitan antar topik pengetahuan. Analisis *Co-occurrence* dalam VOSviewer memperlihatkan kata kunci yang muncul bersama dalam metadata yang dianalisis. Hasil dari analisis *Co-occurrence* ditampilkan dalam bentuk visualisasi jaringan kata kunci yang terhubung. Dalam visualisasi ini, warna dan ukuran bentuk mewakili perbedaan klaster dan dominansi masing-masing kata kunci. Semakin besar ukuran kata kunci atau item yang ditampilkan,

semakin dominan atau menjadi tren dalam konteks penelitian tersebut.

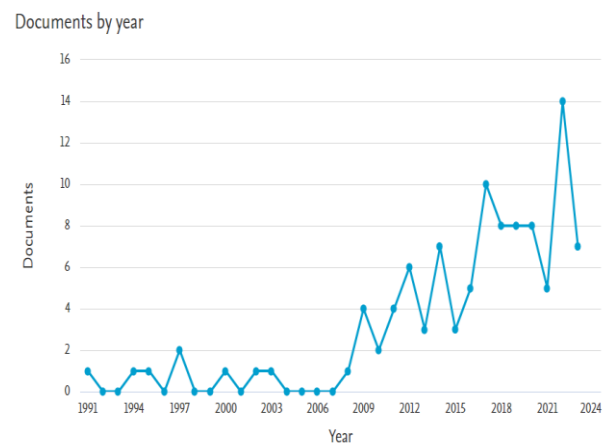
Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh publikasi ilmiah dengan subjek "*public order*" pada pangkalan data Scopus yang diambil pada tanggal 30 Agustus 2023. Hasilnya, ditemukan 2.524 dokumen. Sampel dari penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang dipertimbangkan adalah publikasi dengan kata kunci yang digunakan adalah *Public order*, dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris. Hasilnya ditemukan sebanyak 103 dokumen. Formula boolean yang digunakan adalah TITLE-ABS-KEY ( "*public order*" ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "*public order*" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "english" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "soci" ) ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertumbuhan Jumlah Publikasi Per Tahun

Mengukur jumlah publikasi yang telah melalui proses penelaahan sejawat merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi kemajuan dalam

penelitian ilmiah mengenai suatu topik (Nunen et al., 2018). Bila jumlah publikasi meningkat dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa beragam aspek dalam suatu subjek semakin diperbincangkan dan dieksplorasi. Berikut adalah jumlah publikasi mengenai *public order* pada database scopus:



Sumber: Data Penelitian, 2023

### Gambar 1. Tren Pertumbuhan Jumlah Publikasi Per-tahun

Gambar 1. Menunjukkan jumlah publikasi di tiap tahun, pada tahun 1991-2023. Publikasi mengenai *public order* mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa tahun. Tren tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah publikasi sebanyak 14 dokumen. Terjadi peningkatan publikasi yang cukup signifikan pada tahun 2015 s.d. 2017.

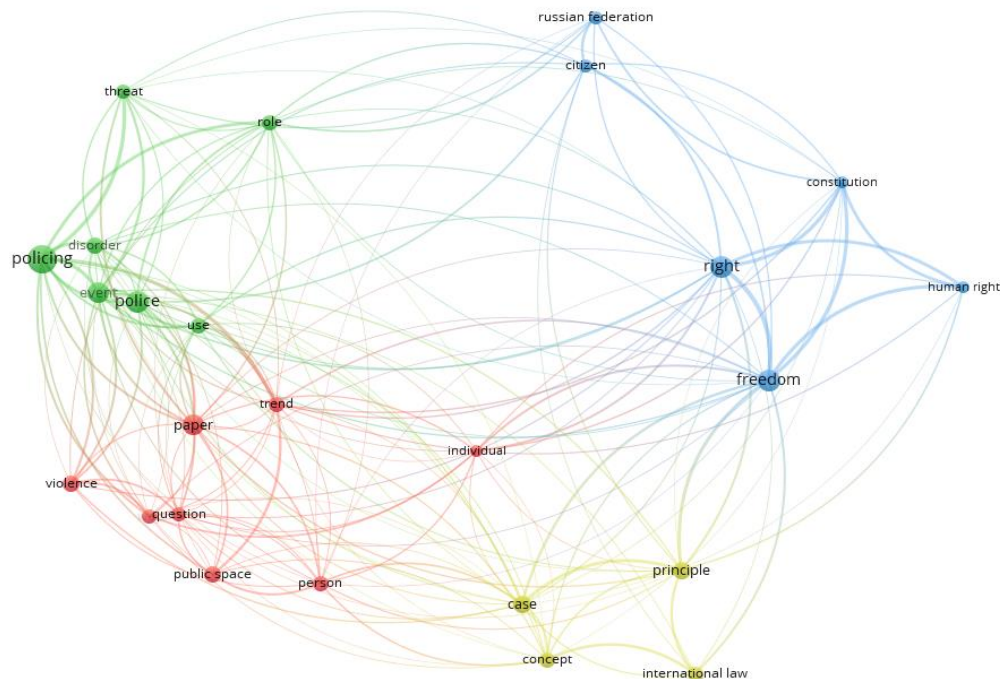
### 2. Tren Topik Penelitian Berdasarkan Hasil Pemetaan Kata Kunci

Informasi mengenai topik penelitian yang paling banyak dijelajahi oleh peneliti dapat diungkapkan melalui



analisis *co-occurrence* menggunakan alat visualisasi VOSviewer. Selain itu, hubungan antara satu topik dengan topik

lainnya dapat ditemukan melalui hasil visualisasi *co-occurrence* yang dapat diakses pada gambar 2.



Sumber: Data Penelitian, 2023

**Gambar 2. Tren Topik Penelitian**

Analisis *Co-occurrence* merujuk pada identifikasi kata kunci yang secara serentak muncul dalam frekuensi yang signifikan. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mengungkap kata kunci yang sering muncul bersama dalam frekuensi tinggi, yang dapat memberikan wawasan mengenai tren topik penelitian tentang *public order* dari tahun 1991 hingga 2023. Visualisasi jaringan *Co-occurrence* memiliki kapabilitas dalam menampilkan tren topik yang paling banyak diteliti oleh para peneliti, serta memvisualisasikan interkoneksi antara

berbagai topik dalam jaringan. Berdasarkan gambar 2. diketahui bahwa terdapat 4 kluster kata kunci yang digunakan dalam publikasi *public order*.

Kata kunci yang terdapat pada kluster 1 (warna merah) adalah: *individual, paper, person, public space, question, trend, violence, way*. Kata kunci yang terdapat pada kluster 1 terkait dengan topik-topik di bidang ilmu social, ilmu hukum dan kebijakan. Terdapat keterkaitan antara kata kunci-kata kunci tersebut dengan *public order*, di antaranya adalah:



**Individual:** *public order* melibatkan ketaatan terhadap norma-norma, hukum, dan peraturan yang ada, serta pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan individual.

**Paper:** paper mengidentifikasi tantangan, solusi inovatif, dan tren dalam menjaga *public order* untuk mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**Person:** perilaku dan tindakan person (individu) berkontribusi terhadap menjaga dan memelihara ketertiban umum (*public order*) dalam masyarakat. Perilaku dan tindakan individu dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan lingkungan sekitarnya.

**Public space:** public space adalah tempat di mana *public order* diwujudkan dan dipertahankan. Public space dapat menjadi ruang berkumpul dan interaksi masyarakat, tempat di mana peraturan dan hukum dapat diimplementasikan untuk menjaga ketertiban umum, dan keadaan *public order* dalam public space memiliki dampak pada citra suatu kota atau wilayah.

**Question:** question dalam konteks pemberian arahan, penyelidikan, dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atau memelihara *public order*.

**Trend:** perubahan dalam trend sosial, budaya, atau perilaku masyarakat dapat

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tingkat ketertiban dalam masyarakat.

**Violence:** keberadaan atau pencegahan tindakan kekerasan (*violence*) dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan kekerasan dapat menjadi penyebab utama gangguan terhadap *public order*.

**Way:** cara individu, masyarakat, dan pemerintah berinteraksi serta mengadopsi cara-cara tertentu dalam menjaga dan memelihara *public order* dalam lingkungan sosial.

Kata kunci yang terdapat pada kluster 2 (warna hijau) adalah: *disorder, event, police, policing, role, threat, use*. Kata kunci yang terdapat pada kluster 2 terkait dengan topik-topik di bidang ilmu hukum, ekonomi dan lingkungan. Terdapat keterkaitan antara kata kunci-kata kunci tersebut, di antaranya adalah: **Disorder dan role:** terkait dengan peran individu, kelompok, atau institusi mempengaruhi kondisi ketertiban atau ketidakteraturan dalam suatu konteks sosial.

**Role dan policing:** terkait dengan peran yang diemban oleh pihak penegak hukum, seperti kepolisian, mempengaruhi tindakan dan pendekatan mereka dalam menjaga ketertiban umum.

**Threat dan police:** terkait dengan pihak kepolisian merespons dan mengatasi

berbagai jenis ancaman terhadap ketertiban umum.

**Event dan policing:** terkait dengan pihak penegak hukum berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran suatu peristiwa atau acara.

**Use dan police:** terkait dengan pihak penegak hukum menggunakan sumber daya, teknologi, atau strategi untuk menjaga ketertiban umum.

Kata kunci yang terdapat pada kluster 3 (warna biru) adalah: *citizen, constitution, freedom, human right, right, russian federation*. Kata kunci yang terdapat pada kluster 3 terkait dengan topik-topik di bidang ilmu hukum, ekonomi, sejarah dan sosiologi. Terdapat keterkaitan antara kata kunci-kata kunci tersebut, dengan *public order* di antaranya adalah:

**Citizen:** perilaku dan partisipasi warga negara mempengaruhi keadaan ketertiban dalam masyarakat.

**Constitution:** prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi suatu negara dapat mempengaruhi dan membentuk kebijakan serta tindakan untuk menjaga ketertiban umum.

**Freedom:** menjaga keseimbangan antara hak-hak individu untuk kebebasan dengan perlunya mempertahankan ketertiban umum.

**Human right:** menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu

dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum.

**Right:** kebebasan dan hak-hak individu diatur untuk menjaga keseimbangan dengan kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban.

**Russian federation:** pemerintah dan otoritas di Federasi Rusia berperan dalam menjaga ketertiban umum.

Kata kunci yang terdapat pada kluster 4 (warna kuning) adalah: *case, concept, international law, principle*. Kata kunci yang terdapat pada kluster 4 terkait dengan topik-topik di bidang ilmu sosial dan hukum. Terdapat keterkaitan antara kata kunci-kata kunci tersebut dengan *public order*, di antaranya adalah:

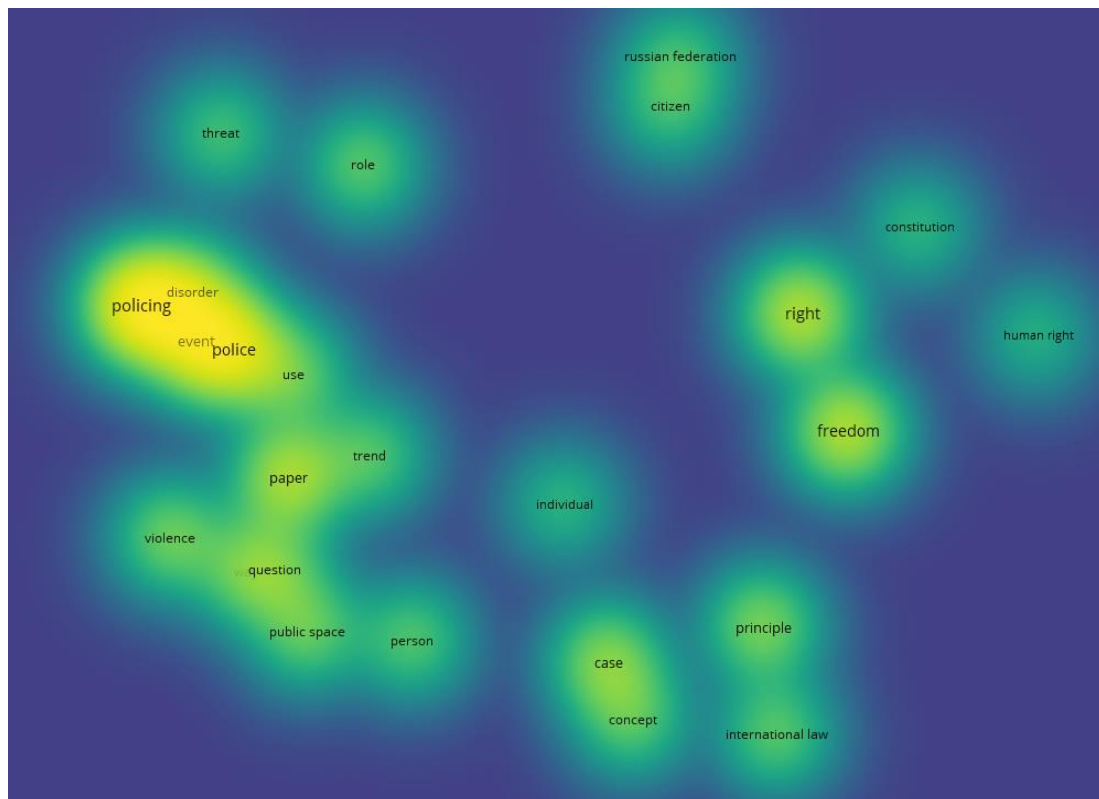
**Case:** penanganan kasus atau peristiwa oleh pihak berwenang dapat mempengaruhi atau berdampak pada stabilitas dan ketertiban umum secara keseluruhan.

**Concept:** pemahaman terhadap konsep-konsep tertentu dalam hukum, masyarakat, atau politik dapat membentuk atau mempengaruhi pendekatan terhadap menjaga ketertiban umum.

**International Law:** norma-norma hukum internasional dapat mempengaruhi dan membentuk kebijakan serta tindakan untuk menjaga ketertiban dalam konteks global.

**Principle:** prinsip-prinsip yang diakui dan diterapkan dalam suatu masyarakat atau hukum dapat membentuk dan

mempengaruhi cara ketertiban dijaga dan dipertahankan.

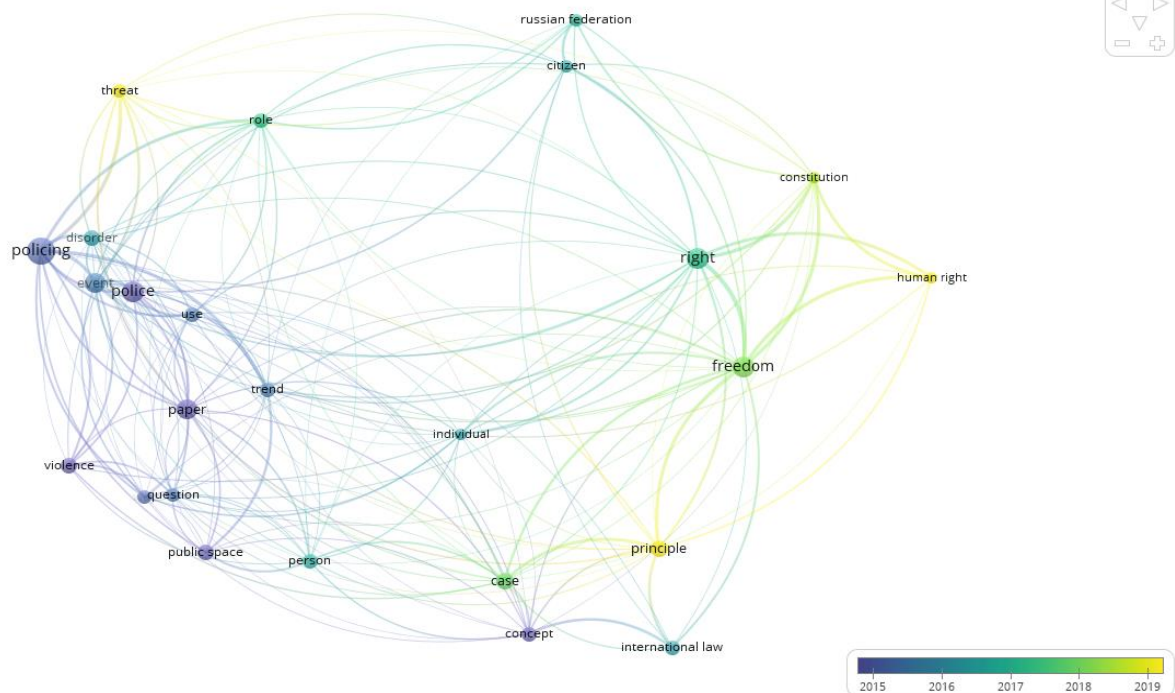


Sumber: Data Penelitian, 2023

**Gambar 3. Co-occurrence Density Visualization**

Dampak visualisasi *Co-occurrence density* adalah kemampuannya dalam mengilustrasikan tren topik dengan pengelompokan warna pada item atau kata kunci. Ketika warna item semakin mendekati skala warna kuning hingga merah, ini menandakan bahwa topik penelitian yang dikaitkan

semakin sering dikejar. Sebaliknya, ketika warna item lebih ke arah skala warna biru, ini menunjukkan bahwa topik penelitian tersebut masih jarang dieksplorasi. Item dengan warna kuning diantaranya adalah: *policing, police, disorder, right, freedom, event, public space, question.*



Sumber: Data Penelitian, 2023

**Gambar 4. Co-occurrence Overlay Visualization**

Visualisasi *Co-occurrence overlay* memiliki kemampuan untuk menampilkan tren topik seiring dengan tahun publikasi. Semakin mendekati skala warna kuning, menandakan bahwa topik penelitian yang berkaitan dipublikasikan lebih baru, sementara semakin mendekati skala warna biru, menandakan bahwa topik penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun yang

lebih lampau. Untuk lebih memvisualisasikan dan memperjelas konsep *Co-occurrence overlay*, Anda dapat melihat informasi lebih lanjut pada tabel 1.

**Tabel 1. Tren Topik Penelitian**  
**Bidang *Public order***

No	Kata Kunci	Jml. <i>Occurrence</i>	Tahun
1	<i>policing</i>	55	2015
2	<i>police</i>	34	2014
3	<i>freedom</i>	32	2018
4	<i>right</i>	32	2017
5	<i>event</i>	30	2015
6	<i>paper</i>	30	2014
7	<i>case</i>	23	2017
8	<i>principle</i>	22	2019
9	<i>violence</i>	20	2013
10	<i>disorder</i>	19	2016
11	<i>public space</i>	18	2014
12	<i>use</i>	17	2015
13	<i>role</i>	17	2017
14	<i>international law</i>	17	2016
15	<i>person</i>	16	2016
16	<i>trend</i>	16	2015
17	<i>concept</i>	16	2014
18	<i>question</i>	14	2015
19	<i>threat</i>	14	2018
20	<i>way</i>	14	2015
21	<i>russian federation</i>	12	2016
22	<i>citizen</i>	12	2016
23	<i>constitution</i>	11	2018
24	<i>individual</i>	11	2016
25	<i>human right</i>	10	2019

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel 1, dapat disimpulkan bahwa beberapa kata kunci telah menjadi tren pada tahun-tahun tertentu. Mayoritas dari kata kunci tren tersebut teramati pada rentang tahun 2013-2019. Pemahaman tentang tren kata kunci ini diidentifikasi berdasarkan nilai frekuensi kejadian (*occurrence*) pada setiap kata kunci.

Kata kunci-kata kunci di bidang *public order* tersebut menjadi tren karena dipengaruhi beberapa faktor, seperti:

a) Konteks Sosial dan Politik: Tren dalam kata kunci "*public order*" dipengaruhi oleh perubahan dalam konteks sosial dan politik. Peristiwa-peristiwa tertentu seperti protes, kerusuhan, atau perubahan undang-undang dapat memicu penelitian dan analisis terkait ketertiban umum. Hal ini mendorong Navickas (2023) mengkaji kamp protes wanita di pangkalan rudal jelajah Umum RAF Greenham, Berkshire, Inggris, antara tahun 1981 dan 1990. Penelitian

tersebut menempatkan Greenham Common dalam konteks reaksi pemerintah Konservatif terhadap protes dan gerakan sosial lainnya di pedesaan yang pada akhirnya membentuk pembentukan undang-undang ketertiban umum pada tahun 1986 dan 1994 Navickas (2023). Selain dilatarbelakangi oleh adanya aksi protes, faktor lain yang mendorong adanya perkembangan tren bidang *public order* adalah adanya tindak kekerasan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Wani (2023)) yang menyebutkan bahwa realitas sehari-hari penegakan ketertiban umum adalah kunci untuk memahami sifat dan operasi negara-negara kolonial dan pasca-kolonial, yang dituangkan dalam topik artikel kebijaksanaan, kesalahan dan kelalaian resmi: birokrasi hokum dan masalah keadilan di India abad kedua puluh. Adanya konteks sosial dan politik mendorong munculnya kata-kata kunci seperti *event, paper, case, violence dan disorder*.

- b) Kasus Hukum dan Peradilan: Kasus hukum yang mendapat perhatian media atau memiliki implikasi penting terhadap ketertiban umum. Munculnya kata-kata seperti *principle, way, use*, Sebagaimana kajian Trevaskes, & Bernot 2023) yang

menawarkan pemahaman tentang Syariah sebagai sistem hukum yang berkembang dan tantangan yang ditimbulkan kepada para sarjana oleh pilihan Syariah sebagai hukum yang mengatur. Di sisi lain, adanya prinsip audiensi publik atau sesi persidangan publik dapat menjadi salah satu jaminan mendasar dalam proses litigasi karena menciptakan semacam pemantauan populer terhadap pekerjaan peradilan, dan juga menciptakan rasa kepastian antara masyarakat dan penggugat tentang keadilan dan ketidakberpihakan hakim (Almashni et al., 2022). Adanya kasus hukum dan peradilan mendorong munculnya kata kunci *right, principle, person, trend, concept, question dan way*.

- c) Perkembangan Teknologi dan Informasi: Kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, dapat memengaruhi organisasi protes atau kerusuhan, serta memberi dampak pada cara penegak hukum dan otoritas merespons situasi terkait ketertiban umum. Trend kata kunci seperti *public space, use, citizen* mulai muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.
- d) Hak Asasi Manusia dan Kebebasan: Perdebatan tentang keseimbangan



antara hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dapat memicu penelitian tentang batasan-batasan dalam menjaga ketertiban.

Di samping riwayat publikasi, penggambaran kepadatan dan penggambaran klaster juga bisa dimanfaatkan untuk mengamati tren tingkat kejenuhan dan klasifikasi pengelompokan topik pembahasan. Tingkat kejenuhan/kepadatan dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar 3. Kepadatan data dapat terlihat dalam visualisasi warna jaringan yang berwarna kuning gelap. Semakin gelap dan besar lingkaran pada item, maka semakin sering/topik tersebut dibahas dalam penelitian. Sebaliknya, semakin pudar warna kuning dan tidak begitu gelap, maka topik tersebut masih kurang diteliti oleh pihak lain, sehingga dapat diidentifikasi sebagai bidang/topik yang memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut di masa mendatang. Dalam unit analisis *Co-occurrence* yang terlihat melalui visualisasi *overlay*, tampak bahwa topik-topik seperti "*Russian Federation*," "*citizen*," "*constitution*," "*individual*," dan "*human right*" memiliki potensi untuk dieksplorasi dalam penelitian mendatang. Implikasi dari berbagai penelitian yang dilakukan berkaitan dengan *public order* antaralain dapat berdampak pada

perbaikan kebijakan, penegakan hukum yang lebih baik, pendidikan masyarakat, ide-ide inovatif, evaluasi program yang ada, kerjasama internasional yang lebih baik, serta peningkatan keamanan dan kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan dengan topik atau kata kunci peran dari Satpol PP menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum (Suhendi, 2021). Dalam mendukung peran strategis tersebut, Satpol PP dalam melakukan upaya persuasif, preventif, dan represif (Jumadil, Jaya, & Hartawati, 2022). Di samping itu, meskipun peran yang dilakukan oleh Satpol PP belum maksimal tetapi Satpol PP dapat mengupayakan evaluasi secara teratur terkait dengan tugas dan fungsi serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan ketertiban umum tersebut (Jamiu, 2022).

Di Samping peran strategis Satpol PP, adanya peran dari Camat, dalam mengkoordinasikan terselenggaranya ketertiban umum di daerah, dapat dilakukan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi tidak hanya dilakukan dengan pihak internal kecamatan tetapi juga kepada pemerintah desa, khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan seperti system keamanan lingkungan, dan kegiatan lainnya pada level desa

(Masengi, Pangemanan, & Kumayas, 2018). Koordinasi berikutnya dapat dilakukan dengan badan/dinas yang berwenang khususnya dalam pengaturan pedagang kaki lima, agar dapat mendorong terwujudnya ketertiban umum di daerah (Noor, 2022). Pada upaya penanganan konflik, Camat juga dapat melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat mewujudkan ketertiban umum di wilayahnya (Komaling, Pangemanan, & Kumayas, 2018).

Berbagai penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan adanya keterlibatan dari beberapa lembaga di Indonesia yang dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Adanya penelitian yang dilakukan baik oleh penelitian sebelumnya maupun penelitian yang saat ini penulis lakukan dapat dinilai sebagai upaya untuk memberikan kontribusi keilmuan khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian ini dapat berkontribusi pada penumbuhan ide-ide baru yang lebih inovatif terkait dengan *public order*.

Keterbatasan penelitian ini meliputi penggunaan satu database tunggal, yakni Scopus. Untuk keberagaman dan validitas yang lebih baik, akan lebih jika melakukan perbandingan dengan data dari berbagai sumber. Selain itu, dalam pemetaan topik,

hanya menggunakan satu aplikasi yaitu VOSviewer, sementara pendekatan yang lebih variatif dengan menggunakan berbagai aplikasi pemetaan dapat memberikan visualisasi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, akan lebih bermanfaat jika melibatkan diskusi dengan para ahli dalam bidang *public order*. Ini dapat membantu melengkapi pemahaman dan interpretasi hasil penelitian.

## PENUTUP

Pada pangkalan data Scopus, tercatat 2524 publikasi ilmiah yang berfokus pada subjek "*public order*". Namun, setelah membatasi pencarian hanya pada jenis dokumen artikel dan kata kunci "*public order*", serta menggunakan bahasa Inggris sebagai kriteria, ditemukan 103 dokumen yang sesuai dengan parameter tersebut. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2015 hingga 2017. Tren paling tinggi dalam jumlah publikasi tercatat terjadi pada tahun 2022, dengan total 14 dokumen yang diterbitkan.

Terdapat 2856 kata kunci, 25 di antaranya saling berhubungan dan dikelompokkan dalam 4 kluster. Kata kunci yang menjadi trend tersebut di antaranya adalah *policing*, *police*,

*freedom, right, event, paper, case, principle, violence, disorder, public space, use, role, international law, person, trend, concept question, threat, Russian federation, citizen, constitution, individual, human right.*

Kata kunci tersebut menjadi tren disebabkan beberapa faktor, yaitu konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan. Topik-topik penelitian terkait dengan konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan, direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan kajian mendalam dan berkelanjutan terkait topik-topik yang menjadi tren tersebut. Adpaun topik "*russian federation*," "*citizen*," "*constitution*," "*individual*," dan "*human right*" memiliki potensi untuk dieksplorasi dalam penelitian mendatang. Penelitian ini dapat berkontribusi pada penumbuhan ide-ide baru yang lebih inovatif terkait dengan *public order*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almashni, M. I., Yusuff, Y. M. I., & Noor, N. A. M. (2022). Public Hearings Principle in The Palestinian Civil Procedure Law and Its Relationship to *Public order* Concept in Light of The Covid-19 Pandemic. *BiLD Law Journal*, 7(2).
- Asmawanti S, D., & Soya, M. (2023). Bibliometric Analysis of Good Government Governance in Indonesia from 2015-2020. *Monex – Journal of Accounting Research*, 12(01).  
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/3760/2248>
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(2).  
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- De Looze, M. A., & Lemarie, J. (1997). Corpus Relevance Through *Co-word* Analysis: An Application to Plants. *Scientometrics*, 39(3).
- Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1).  
[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/jurnal\\_endy\\_fixs-\(07-03-20-02-21-32\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/jurnal_endy_fixs-(07-03-20-02-21-32).pdf)
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.

- Fitri, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Membangun Generasi Muda Sadar Budaya Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal El-Riyasah*, 10(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v10i1.7567>
- Iryna, M., Natalya, Y., & Oleksandra, F. (2022). 'Public order' As Grounds For Refusal In The Recognition And Enforcement Of A Decision In International Commercial Arbitration: Ukrainian Realities And International Experience. *Access to Justice in Eastern Europe*, 5(1). <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-n000096>
- Jamiu, R. O. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Mandonga Kota Kendari (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Retrieved from [http://eprints.ipdn.ac.id/11026/1/2.Rahmat Ode Jamiu\\_29.1614\\_.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/11026/1/2.Rahmat Ode Jamiu_29.1614_.pdf)
- Jumadil, A., Jaya, A., & Hartawati, A. (2022). Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. *Reformasi Hukum*, 26(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.461>
- Komaling, C. P., Pangemanan, S., & Kumayas, N. (2018). Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20203>
- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(02). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53878/jr.v6i2.153>
- Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. *Society*, 8(2).
- Masengi, S. O., Pangemanan, S., & Kumayas, N. (2018). Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21954>
- Muchsin, T., Saliro, S. S., Manullang, S. O., & Sihaloho, N. T. P. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Singkawang. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4226>
- Narrain, S. (2018). Social media, violence and the law: "Objectionable material" and the changing contours of hate speech regulation in India. *Culture Unbound*, 10(3).

- <https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.2018103388>
- Navickas, K. (2023). Legal and historical geographies of the Greenham Common protest camps in the 1980s. *Journal of Historical Geography*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2023.07.002>
- Nayoan, F. E. K. H., & Kaawoan, J. (2018). Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kota Manado. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21112/20823>
- Noor, M. (2022). Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Tugas Pengaturan PKL di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Retrieved from <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/35589>
- Nunen, K. van, Li, J., Reniers, G., & Ponnet, K. (2018). Bibliometric analysis of safety culture research. *Safety Science*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.08.011>
- Nurrahman, A. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Tatapamong*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1232>
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1154>
- Sakti, F. T., & Pribadi, G. (2018). *Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta* [UIN Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/35034/>
- Sandra, O., Suryanef, & Muchtar, H. (2019). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum di Batang Kapas. *JCE*, 2(1). <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/110/25>
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 1(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1145/672>

- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Trevaskes, S., & Bernot, A. (2023). Surveillance infrastructure in China: Key concepts and mechanisms enhancing the Party-state's governance ambitions. *Global Media and China*. <https://doi.org/10.1177/20594364231171013>
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan InformasI*, 39(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413>
- Wahyuni, S. (2014). Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law. *Supremasi Hukum*, 3(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1947/1418>
- Wani, J. I. (2023). Official discretion, errors, and oversights: legal bureaucracy and the question of justice in twentieth-century India. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 33(2). <https://doi.org/10.1017/S135618632000207>
- Zuhraeni, U. M. H. Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>